RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RPJPD

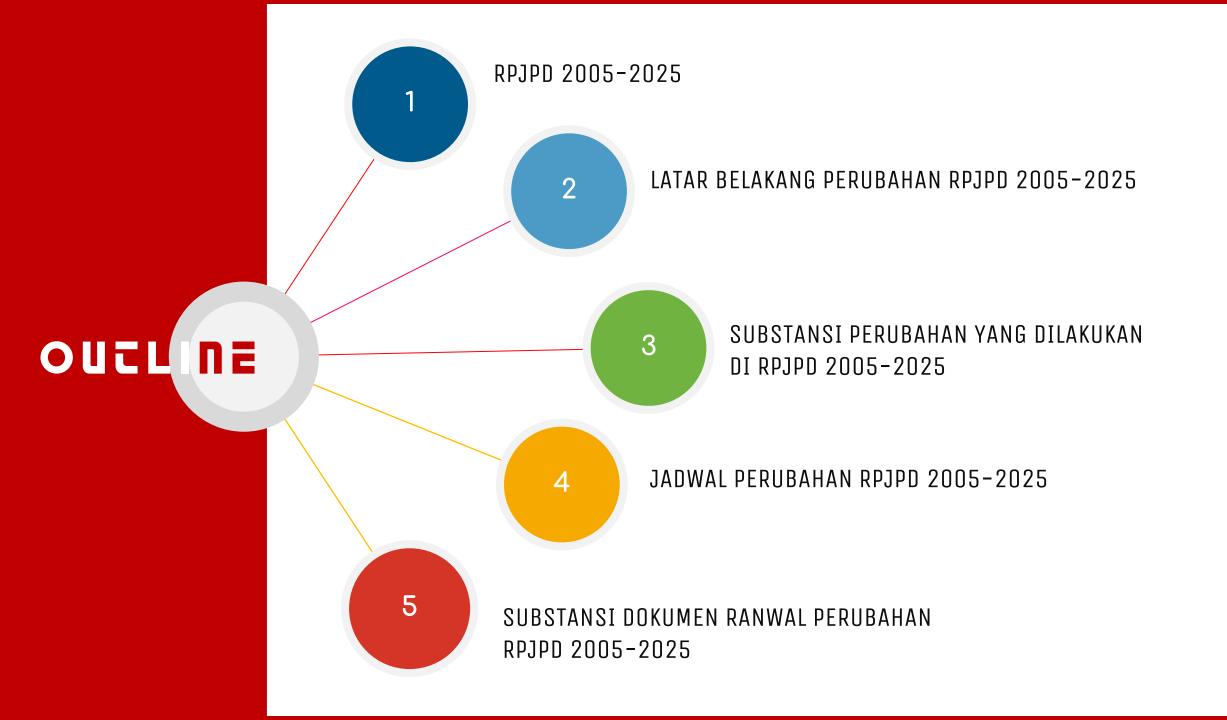
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2005-2025



DISAMPAIKAN DALAM FORUM KONSULTASI PUBLIK PERUBAHAN RPJPD 2005-2025 KOTA SEMARANG/







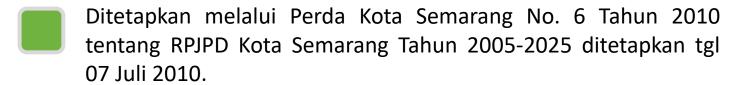
RPJPD 2005-2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 6 TAHUN 2010



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025

DOKUMEN RPJPD 2005-2025



- Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang dengan jangka waktu Panjang 20 (dua puluh) tahun.
- Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (dok. RPJMD).
- Terbagi kedalam 4 tahapan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD.

TAHAP I



RPJMD 2005-2010

TAHAP II



RPJMD 2010-2015

TAHAP III



RPJMD 2016-2021

TAHAP IV



RPJMD 2021-2025



LATAR BELAKANG PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

LATAR BELAKANG PERUBAHAN RPJPD 2005-2025, ancara Lain:

Τ

PENYESUAIAN REGULASI YANG BELUM DIPEDOMANI DALAM RPJPD 2005-2025

PERDA RPJPD 2005-2025

RANWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

SUBSTANSI

PERUBAHAN YANG HARUS DILAKUKAN

- 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- **UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah

Perubahan **kewenangan Kabupaten/ Kota**, diantaranya: Jenjang Pendidikan Menengah, Terminal Tipe A, Air Bawah Tanah (ABT) dan Bahan Galian C, Urusan Kelautan, Telekomunikasi, Penanganan NAPZA

- 2. .
- PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Kewajiban untuk menyusun **KLHS** dalam penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan

3. .

- **Perpres No. 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Mempedomani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

4. .

Perda Kota Semarang No. 14/2011 tentang RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031



Penyelarasan dengan kebijakan **RTRW** Kota Semarang. RPJPD 2005-2025 belum mempedomani Perda RTRW karena Perda RTRW ditetapkan setelah RPJPD ditetapkan ...LANJUTAN PENYESUAIAN REGULASI YANG BELUM DIPEDOMANI DALAM RPJPD 2005-2025

PERDA RPJPD 2005-2025

RANWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

SUBSTANSI

PERUBAHAN YANG HARUS DILAKUKAN

5. Permendagri No. 54 Tahun 2010

H

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8/2008 ttg Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD



- Penyesuaian proses **penyusunan**, **sistematika**, **dan substansi** dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017
- Penambahan tujuan (beserta indikatornya)
- Sasaran pokok

PENYELARASAN DENGAN KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS AKTUAL

- o Implementasi menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- o Pengembangan SDM yang toleran dan unggul melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan sistem inovasi
- Perkembangan revolusi industri 4.0
- Perkembangan ekonomi kreatif
- Inovasi Alternatif Pembiayaan Pembangunan

III PENINGKATAN KUALITAS DOKUMEN RPJPD

- o Penajaman arah kebijakan tahap 4 RPJPD sebagai pedoman penyusunan RPJMD 2021-2025
- Memberikan instrumen (indikator) untuk evaluasi kebijakan jangka panjang



SUBSTANSI PERUBAHAN YANG DILAKUKAN DI RPJPD 2005-2025

SUBSTANSI PERUBAHAN YANG DILAKUKAN DI RPJPD 2005-2025

RPJPD 2005-2025 DASAR HUKUM

RANWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

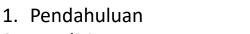
Menambahkan & mengganti referensi aturan-aturan terbaru yang belum ada di RPJPD yang berimplikasi pada perlunya perubahan **RPJPD**



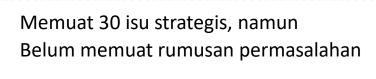
SISTEMATIKA

TERDIRI DARI 5 BAB YAITU:

- 2. Kondisi Umum
- 3. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Daerah
- 4. Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah



- 5. Penutup



TERDIRI DARI 6 BAB, YAITU:

- 1. Pendahuluan
- Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
- 4. Visi dan Misi Daerah
- Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
- 6. Penutup

PERMASALAHAN & **ISU STRATEGIS**

Terdiri dari:

5 permasalahan pokok,

- 14 permasalahan,
- 25 akar masalah dan
- 14 isu strategis

Memuat rumusan permasalahan pokok, permasalahan, akar masalah dan isu strategis yang disesuaikan dengan permasalahan dan isu aktual di tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional



VISI

1 RUMUSAN

1 RUMUSAN ----- (tetap)



MISI

5 RUMUSAN

5 RUMUSAN ----- (tetap)

RANWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025 RPJPD 2005-2025 Tahap 1 → 46 rumusan arah kebijakan \circ Tahap 1 \rightarrow 46 rumusan arah kebijakan ----- (tetap) Tahap 2 → 46 rumusan arah kebijakan \circ Tahap 2 \rightarrow 46 rumusan arah kebijakan ----- (tetap) Penyesuaian dg strategi & ○ Tahap 3 → 14 rumusan arah kebijakan -----Tahap 3 → 46 rumusan arah kebijakan ARAH KEBIJAKAN arah kebijakan RPJMD Tahap 4 → 46 rumusan arah kebijakan 2016-2021 Penajaman & penyesuaian ○ Tahap 4 → 18 rumusan arah kebijakan ----dg isu strategis TUJUAN TIDAK DIRUMUSKAN 5 TUJUAN dengan 7 INDIKATOR CAPAIAN SASARAN **36 RUMUSAN SASARAN** 6 RUMUSAN SASARAN POKOK ----- (diganti dengan sasaran pokok)



JADWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

JADWAL TAHAPAN PENYUSUNAN

PERUBAHAN RPJPD TAHUN 2005-2025

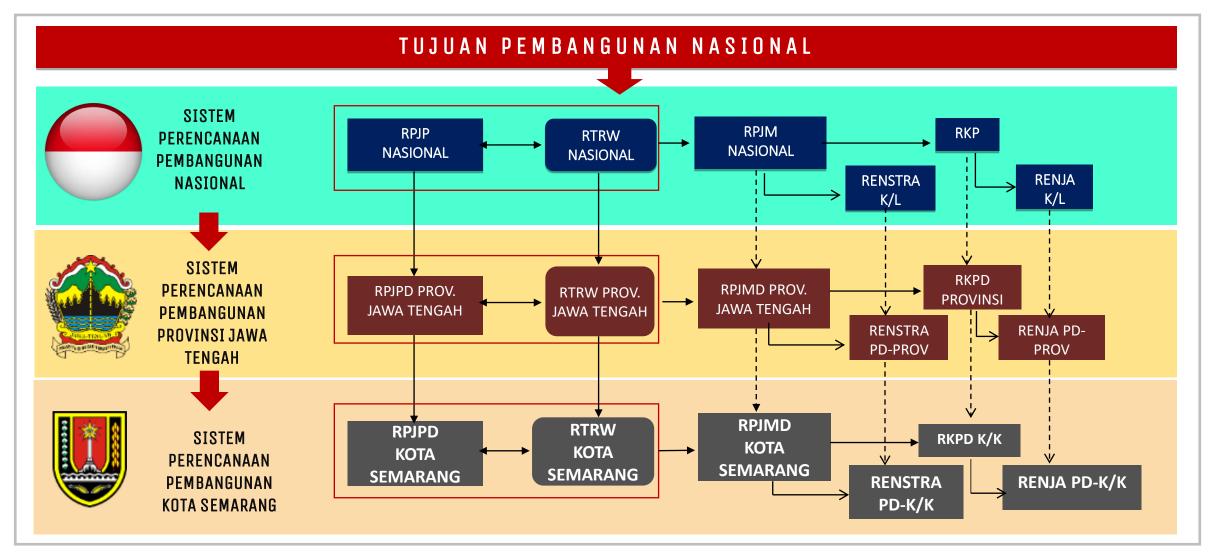


5

SUBSTANSI DOKUMEN RANWAL PERUBAHAN RPJPD 2005-2025

- KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN
- GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG (UPDATE DATA)
- O VISI
- o MISI
- o TUJUAN
- SASARAN
- ARAH KEBIJAKAN

KETERKAITAN ANTARDOKUMEN PERENCANAAN

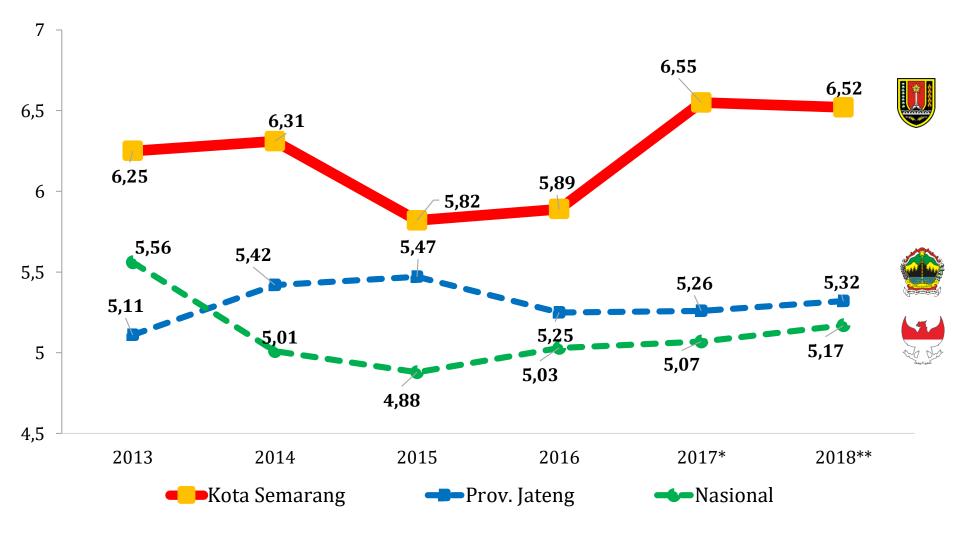


Perubahan Atas RPJPD Kota Semarang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJPN dan RTRW serta memerhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan yang terwakili melalui penyusunan KLHS.

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SEMARANG

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SEMARANG

Tahun 2013-2018



Sumber: BPS, 2019

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA SEMARANG

Tahun 2014-2018

Califor DDDD Lawangan Haaba Tahun Dagan 2010	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
Sektor PDRB Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010	2014	2015	2016	2017	2018	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.71	4.11	1.80	-0.64	4.05	
B. Pertambangan dan Penggalian	1.14	1.33	-6.31	-7.27	-8.36	
C. Industri Pengolahan	6.96	4.76	4.36	5.36	4.88	
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.72	2.15	7.19	6.21	6.39	
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.52	1.34	2.73	3.29	3.60	
F. Konstruksi	4.48	6.02	6.09	6.37	6.29	
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.79	4.37	5.62	5.63	6	
H. Transportasi dan Pergudangan	10.16	5.01	6.21	7.13	7.95	
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.65	6.24	7.43	7.50	8.05	
J. Informasi dan Komunikasi	12	9.75	8.59	10.43	10.19	
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.25	7.26	6.31	6.67	6.21	
L. Real Estate	7.29	8.16	7.93	8.56	8.57	
M, N. Jasa Perusahaan	8.02	8.48	8.85	9.87	10.71	
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.38	5.42	5.12	5.46	5.33	
P. Jasa Pendidikan	10.02	7.34	7.71	7.57	8.55	
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.20	6.40	7.89	12.71	4.97	
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8.54	3.28	7.09	9.25	11.12	
PDRB	6.31	5.82	5.89	6.55	6.52	

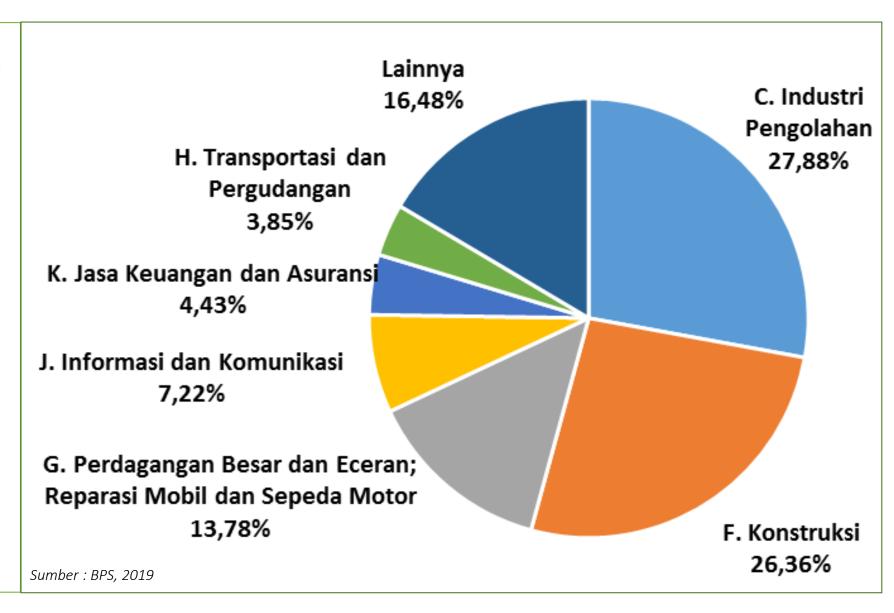
Sumber: BPS, 2019

Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang sebesar 6,52 persen atau melambat tipis jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang mencapai 6,55 persen. Pertumbuhan ekonomi sektoral paling tinggi adalah sektor jasa dimana laju pertumbuhan ekonomi Jasa Lainnya sebesar 11,12 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 10,71 persen.

STRUKTUR EKONOMI KOTA SEMARANG TAHUN 2018

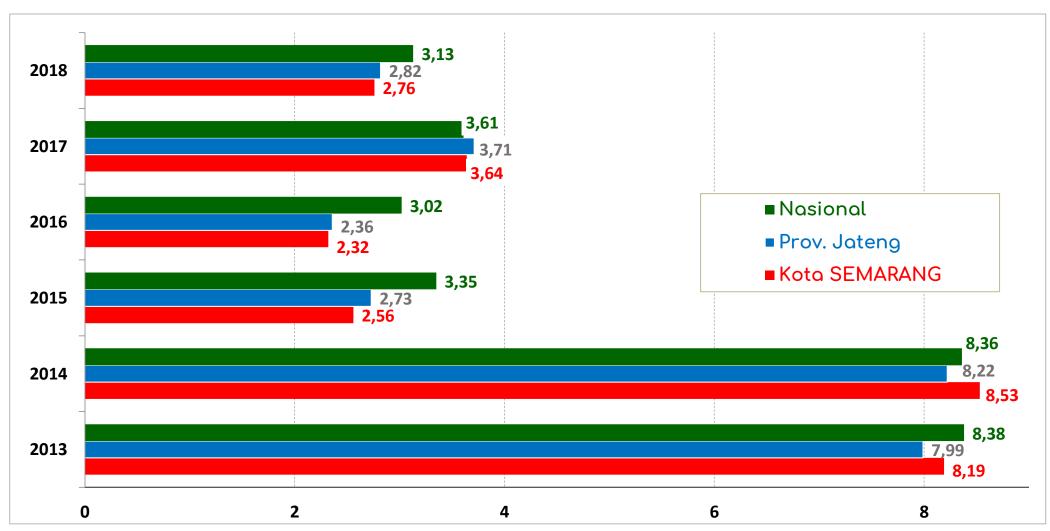
NILAI TAMBAH PRODUKSI KOTA SEMARANG DISUMBANG OLEH TIGA SEKTOR PEREKONOMIAN UTAMA DAERAH YAKNI:

- Sektor IndustriPengolahan (27,88%);
- Sektor Konstruksi (26,36%); dan
- Sektor Perdagangan
 Besar dan Eceran;
 Reparasi Mobil dan
 Sepeda Motor (13,78%).



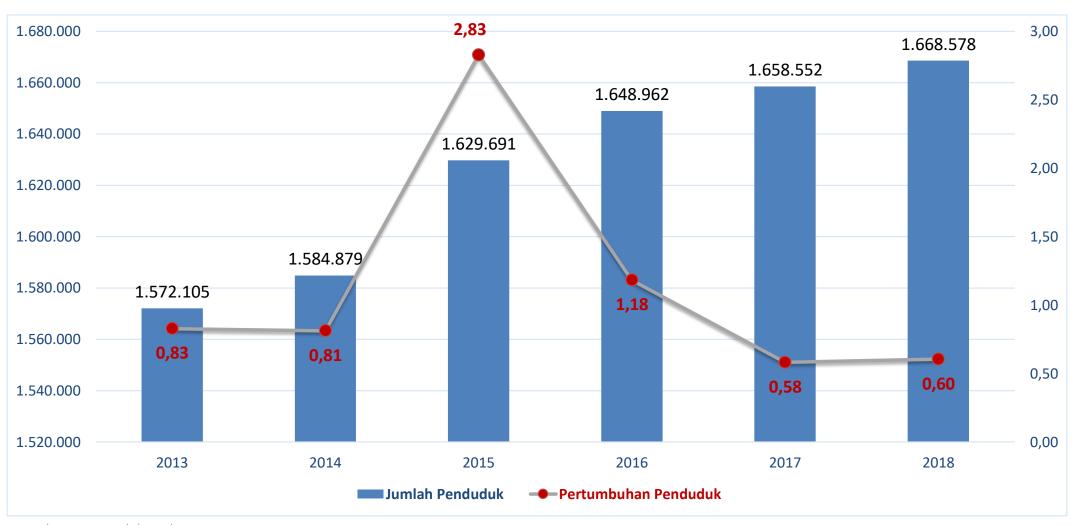
LAJU INFLASI (%) KOTA SEMARANG DENGAN NASIONAL

TAHUN 2013-2018



Sumber: BPS, 2019

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA SEMARANG Tahun 2013-2018



Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2019

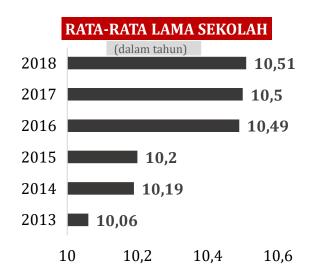
SEBARAN PENDUDUK KOTA SEMARANG TAHUN 2013-2018

				Sex Ratio	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk		
NO			PENDUDUK					
	KECAMATAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			(km2)	(jiwa/km2)
		(orang)	(orang)	(orang)				
1	Semarang Tengah	29.322	31.751	61.073	3,66	92,35	6,14	9.946,74
2	Semarang Utara	61.938	63.857	125.795	7,54	96,99	10,97	11.467,18
3	Semarang Timur	35.647	37.844	73.491	4,40	94,19	7,70	9.544,29
4	Gayamsari	36.732	37.222	73.954	4,43	98,68	6,18	11.966,67
5	Genuk	57.300	56.952	114.252	6,85	100,61	27,39	4.171,30
6	Pedurungan	95.788	97.010	192.798	11,55	98,74	20,72	9.304,92
7	Semarang Selatan	33.827	35.548	69.375	4,16	95,16	5,93	11.698,99
8	Candisari	39.576	40.914	80.490	4,82	96,73	6,54	12.307,34
9	Gajah Mungkur	29.639	30.507	60.146	3,60	97,15	9,07	6.631,31
10	Tembalang	89.058	89.772	178.830	10,72	99,20	44,20	4.045,93
11	Banyumanik	69.203	70.724	139.927	8,39	97,85	25,69	5.446,75
12	Gunung Pati	47.035	46.831	93.866	5,63	100,44	54,11	1.734,73
13	Semarang Barat	78.337	80.681	159.018	9,53	97,09	21,74	7.314,54
14	Mijen	36.754	36.725	73.479	4,40	100,08	57,55	1.276,79
15	Ngaliyan	69.032	69.586	138.618	8,31	99,20	37,99	3.648,80
16	Tugu	16.776	16.690	33.466	2,01	100,52	31,78	1.053,05
TAI	HUN 2018	825.964	842.614	1.668.578	100,00	98,02	373,70	4.465,02
TAI	HUN 2017	823.173	835.379	1.658.552	-	98,54	373,70	4.438,19
TAF	HUN 2016	818.744	830.218	1.648.962	-	98,62	373,70	4.412,53
TAF	HUN 2015	808.348	821.343	1.629.691	-	98,42	373,70	4.360,96
TAI	HUN 2014	787.705	797.174	1.584.879	-	98,81	373,70	4.241,05
TAI	HUN 2013	781.176	790.929	1.572.105	-	98,77	373,70	4.206,86

- Jika dilihat penyebarannya, sebagian besar penduduk berdomisili di Kecamatan Pedurungan. Sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Tugu.
- Jika melihat komposisi jenis kelamin, maka sebagian besar penduduk Kota Semarang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah penduduk sebesar 842.614 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 825.964 jiwa. Angka ini memperlihatkan sex ratio sejumlah 98,02 yang mengindikasikan bahwa diantara 100 penduduk perempuan, hanya terdapat 98 penduduk laki-laki.
- Untuke kepadatan penduduk jiwa/km2 terbesar adalah Kecamatan Candisari dan terendah adalah Kecamatan Tugu.

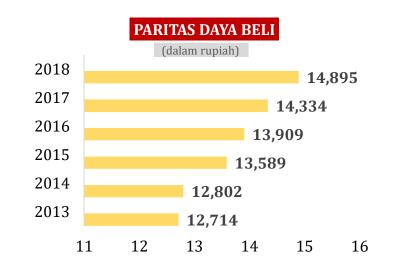
Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2019

90 82,72 82,01 81,19 80,23 79,24 71,39 80 70,81 70,18 69,49 69,55 68,9 71,12 69,98 70,52 68,78 70 60 50 40 30 2014 2015 2016 2018 2017 **■ KOTA SEMARANG ■ PROV. JATENG ■ NASIONAL**





PERBANDINGAN IPM KOTA SEMARANG DENGAN PROVINSI JATENG DAN NASIONAL TAHUN 2013-2017

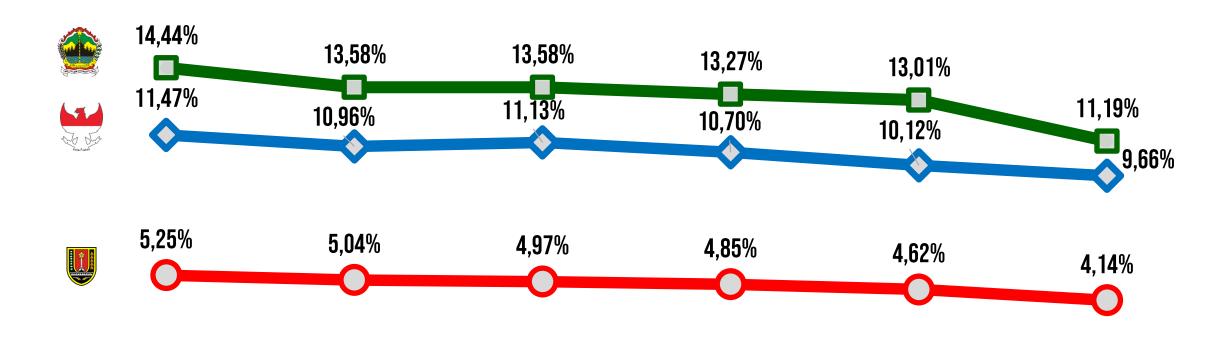




Sumber: BPS, 2019

ANGKA KEMISKINAN

DIBANDINGKAN DENGAN PROVINSI JATENG DAN NASIONAL



Sumber: BPS, 2019

2013

2014

2015

2016

2017

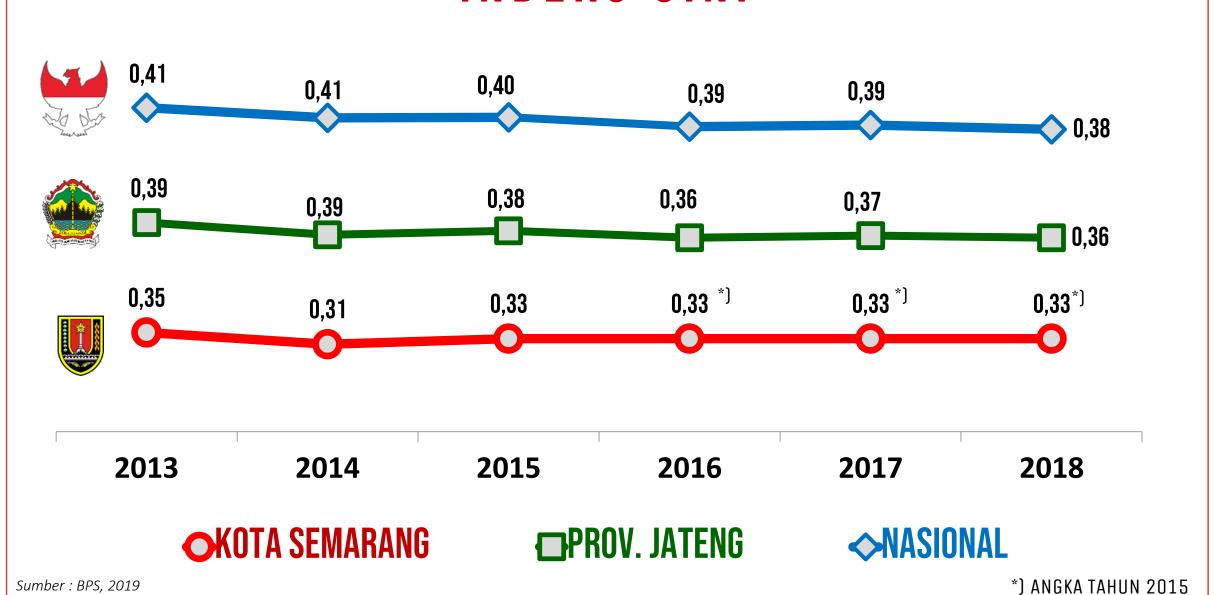
2018

KOTA SEMARANG

PROV. JATENG



INDEKS GINI

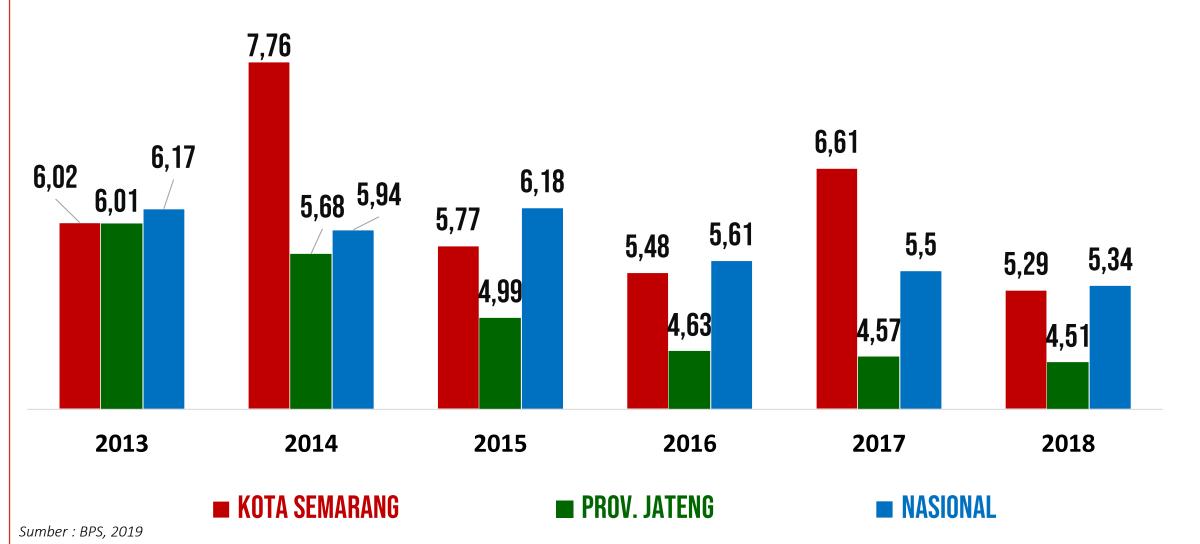


24

TPT KOTA SEMARANG

[TINGKAC PENGANGGURAN TERBUKA]

DIBANDINGKAN DENGAN PROVINSI JATENG DAN NASIONAL



KINERJA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG, antara tain

II D A T A N	танип							
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (%) *	81,78	82,60	88,07	90,19	88,72	89,54		
PERSENTASE KAWASAN BANJIR DAN ROB *	n/a	n/a	5,34	5,02	4,60	4,37		
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) **	n/a	n/a	44.84	44.84	50.93	51.94		
PERSENTASE LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH***	0,56	1,11	0,99	0,79	0,74	0,29		

*) Sumber : DPU Kota Semarang, 2019 **) Sumber : DLH Kota Semarang, 2019

^{***)} Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2018

KINERJA PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG

OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) **KOTA SEMARANG**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH n No 175 Km | 4 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)86608

Semarang, 30 Mei 201

|Lo /S/XVIII.SMG/05/2017 Tiga Berkas

Keuangan Pemerintah Kota Semarang

Kepada Yth. Walikota Semarang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolas dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentan Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemerika Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarat Rasilsasii Anggaran, Laporan Perubahan Sakto Anggaran Lobih, Laporan Arus Kas, La Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Lapora Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Lapon Keuangan Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhad peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendap "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ke Semarang Tahun Anggaran 2016.

2016 = WTP



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

13.6 /S/XVIII.SM(7/05/2018 Satu Berkas

Hazil Pemerikasan atas Lacoran Keuangan Pemerintah Semarang Tahun Anggaran 2017

Yth. Walikota Semarang

Semarang

Berdssarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeril Pengelolaan dan Tanggungjawah Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 T 2006 tentang Baden Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, E Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keu-Perserintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, La

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian La Keuangan Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan kesesuaian La Keuangan dengan Standar Akurtansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepa terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemerikasan atas Laporan Kecangan Pemerintah Kota Sen Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semara: TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Onini atas Laperan Kenangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan per "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sen

2017 = WTP



1b4 /S/XVIII.SMG/03/2019

Satu Berkas Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018

dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas

Kenada Vth.

dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan angan Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semaran Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut;

1. Opini atas Laporan Keuangan

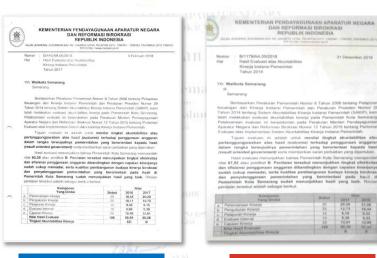
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wala Tanpa Pengecualian (WTP)" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

- 2. Sistem Pengendalian Inter-
- BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 a. Pengelolaan piutang dan pendapatan pajak daerah tidak tertib karena realisasi
- pendapatan pajak belum didukung dengan rincian wajib pajak; dan Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak tertib diantaranya kebijakan akuntansi belum sepenuhnya diterapkan, dan Aset lain-lain digunakan untuk menampung aset tetap jalan yang tidak diketahui aset tetap induknya.
- Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Semarang agar Memerintahkan Kepala Bapenda supaya merevisi perjanjian Bapenda, BPKAD dan PT Bank Jateng dengan menambahkan klausul mekanisme pembayaran pajak melalui virtual account yang bersifat statis; dan

2018 = WTP

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA KOTA SEMARANG





2016 = CC

2017 = B

2018 = B

(55,94)

(60.28)

(67,92)

Sumber: KemenPan&RB, 2019

Sumber: BPK, 2018

EVALUASI UMUM CAPAIAN RPJPD KOTA SEMARANG

			TAHAP I AKHIC 2010	TAHAP II AKHIՐ 2015	TAHAP III AKHIC 2018
Mewujudkan sumber daya manusia Kota Semarang yang berkualitas		IPM	 79,96	80,22	82,72
Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokrasi dan bertanggung jawab		Indeks Reformasi Birokrasi**	N/A	56,1	68,86
Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,87	5,82	6,52
Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan	>	IKLH***	45,38	55,00	51,94
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Angka kemiskinan INDEKS GINI	5, 12 0,32	0,33	0,33*

VISI DAN MISI RPJPD KOTA SEMARANG

VISI RPJPD

"SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS, TERTIB DAN BERBUDAYA"

MISI RPJPD

FOKUS RPJPD

Mewujudkan sumber daya manusia Kota Semarang yang berkualitas



sumber daya manusia

Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan kehidupan politik yang demokrasi dan bertanggung jawab





таса кегога pemerintahan

Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah





Dava saing EKONOMI

Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan



THE TOP KESEJAHTERAN Infrastruktur **WILAYAH**



кеsеjaнсегаап

Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat



KETERKAITAN **VISI RPJPD** DAN **VISI RPJMD** KOTA SEMARANG

VISI RPJPD 2005-2025

"SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS, TERTIB DAN BERBUDAYA"

RPJMD II 2010-2015

Pemantapan Sektorsektor Prioritas

RPJMD I 2005-2010

Penguatan Sektor-sektor Prioritas

Visi:

Semarang Kota Metropolitan yang religius berbasis Perdagangan dan jasa Visi:
Terwujudnya
semarang kota
perdagangan dan
jasa yang berbudaya
menuju masyarakat
sejahtera

RPJMD III 2016-2021

Pencapaian Daya Saing Wilayah & Masyarakat

Visi:

Semarang kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera **RPJMD IV** 2021-2025

Akselerasi pembangunan di berbagai bidang



Fokus perubahan adalah MENAJAMKAN arah kebijakan pembangunan tahap IV

TEMA PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SEMARANG

yang Berbudaya dan Bermartabat

Penguatan sektor-sektor prioritas guna mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan Yang Religius Berbasis Perdagangan Dan

Pemantapan sektor-sektor prioritas guna mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa

2005-2010

Jasa

Mengakselerasi hasil-hasil pembangunan guna mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Mandiri, Melayani dan Berdaya Saing

Semarang sebagai Kota 2021-2025 Perdagangan dan Jasa untuk Menyejahterakan Masyarakat 2016-2021 2010-2015

Mewujudkan daya saing Kota

LANGKAH PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP IV

MENGANALISIS
KONSISTENSI
KEBIJAKAN RPJMD
EKSISTING



2

MENENTUKAN
PERMASALAHAN & ISU
STRATEGIS YANG
SECARA SPESIFIK
AKAN DIHADAPI PADA
TAHAP IV

3

IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN & ISU
STRATEGIS TAHAP III
DAPAT DIGUNAKAN,

DENGAN ASUMSI BAHWA
TIDAK SEMUA HAL
DIMAKSUD DAPAT
DIPECAHKAN PADA TAHAP III

4

SINKRONISASI KEBIJAKAN RPJPD PROV. JATENG & RPJPN

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MELENGKAPINYA, KHUSUSNYA UNTUK PERIODE KE IV

KETERKAITAN VISI, MISI, DAN TUJUAN

PER TAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG

VISI: "SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS, TERTIB DAN BERBUDAYA"

		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				
MISI	TUJUAN	TUJUAN	REALISASI (2005-2010)	REALISASI (2010-2015)	TAHAP III (2016-2021)	TAHAP IV (2021-2025)	
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Semarang yang Berkualitas	1. Meningkatkan daya saing dan kualitas SDM	IPM	76,96	80,23	83,23	85,00	
Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Kehidupan Politik yang Demokratis dan Bertanggung Jawab	2. Meningkatkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	na	56,10	> 72	> 75	
3. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah	3. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	na	5,82	6,50	7,50	
4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah	4. Meningkatkan infrastruktur dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	na	45,38	55,00	65,00	
dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	pengembangan wilayah yang merata dan berkelanjutan	Indeks Daya saing Infrastruktur	na	na	na	na	
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	5. Meningkatkan kesejahteraan	Angka Kemiskinan	5,12	4,97	4,53	4,00	
	masyarakat	Indeks Gini	0,32	0,33	0,33*	0,31	

MISI, TUJUAN DAN SASARAN POKOK RPJPD

KOTA SEMARANG 2005-2025

MISI	TUJUAN	SASARAN POKOK
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Semarang yang Berkualitas	1. Meningkatkan daya saing dan kualitas SDM	1. Meningkatnya daya saing SDM
2. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) dan Kehidupan Politik yang Demokratis dan Bertanggung Jawab	2. Meningkatkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik	2. Meningkatnya profesionalisme birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani
3. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah	3. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing	3. Meningkatnya pertumbuhan daerah yang berkelanjutan
4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan	4. Meningkatkan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang merata	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	dan berkelanjutan	5. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan metropolitan
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	6. Menguatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial masyarakat

ARAH KEBIJAKAN TAHAP IV (2021-2025) PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

TUJUAN	SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN TAHAP IV (RPJMD TAHUN 2021-2025)
		1. Pengembangan kompetensi angkatan kerja yang kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja
1. Meningkatkan daya	1. Meningkatnya daya saing	2. Peningkatan kualitas Pendidikan
saing dan kualitas SDM	SDM	3. Peningkatan derajat dan akses layanan kesehatan
		4. Peningkatan karakter dan wawasan kebangsaan
		5. Penguatan pembangunan inklusif
2. Meningkatkan tata	2. Meningkatnya	6. Penguatan kebijakan publik yang strategis
kelola pemerintah dan	profesionalisme birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani	7. Penguatan profesionalisme aparatur
pelayanan publik		8. Pemantapan pelayanan publik yang terintegrasi (sudah termasuk <i>e-gov, smart</i>
pelayanan pabiik	erektii, erisieri, dari melayam	city)
3. Mewujudkan		9. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis untuk pengembangan ekonomi
kemandirian ekonomi	3. Meningkatnya pertumbuhan daerah yang berkelanjutan	10. Penguatan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan
yang berkualitas dan		11. Penguatan sinergitas perekonomian regional
berdaya saing		12. Penguatan iklim investasi yang berkualitas
4. Meningkatkan infrastruktur dan	4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	13. Peningkatan daya dukung dan daya tampung wilayah
pengembangan wilayah	5. Meningkatnya sarana dan	14. Penguatan konektivitas struktur ruang
yang merata &	prasarana pelayanan	15. Optimalisasi pemanfaatan ruang
berkelanjutan	metropolitan	16. Pengendalian pemanfaatan ruang
5. Meningkatkan	6. Menguatnya perlindungan	17. Penguatan jaminan social
kesejahteraan	dan pemberdayaan sosial	18. Pemberdayaan masyarakat marginal
masyarakat	masyarakat	10. I Chiberdayaan masyarakat marginar

MATUR NUWUN

